

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pengujian data mengenai pengaruh Komposisi DPRD, Ukuran DPRD, Struktur Kepemimpinan DPRD, Pengetahuan DPRD, *Tenure* DPRD, Temuan Kelemahan Pengendalian Intern, Temuan Ketidakpatuhan pada UU terhadap Kinerja Pemerintah Daerah pada Tahun 2015. Maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Komposisi DPRD berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah, artinya setiap anggota DPRD yang memiliki partai dan kepentingan yang sama dengan kepala daerah dapat membuat kebijakan yang dibuat cenderung menjadi lebih cepat disetujui. Sehingga kebijakan yang mengarah pada pencapaian kinerja lebih cepat dilakukan.
2. Ukuran DPRD berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah, artinya semakin banyak anggota DPRD diharapkan akan mempermudah DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Hal itu dikarenakan semakin banyak anggota DPRD mencerminkan semakin banyak juga gagasan yang diajukan oleh DPRD sehingga kebijakan yang dilaksanakan oleh kepala daerah dapat dilaksanakan dan diawasi dengan baik dan dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah.
3. Struktur Kepemimpinan berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah, artinya pimpinan DPRD telah menggunakan kemampuan dan kekuasaannya untuk mempengaruhi para anggota DPRD lainnya dalam mencapai keputusan atas kebijakan yang diajukan oleh kepala daerah. Struktur kepemimpinan berperan dalam memastikan bahwa struktur, sistem, dan proses operasional organisasi memberi dukungan terhadap visi misi yang akan dicapai oleh organisasi.
4. Pengetahuan DPRD tidak berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah, artinya anggota DPRD yang memiliki pendidikan tinggi belum tentu mencerminkan pengawasan berjalan dengan baik. Anggota DPRD menempuh pendidikan tinggi dengan keahlian yang berbeda-beda. Hal ini menjadikan anggota DPRD masih perlu untuk mengikuti seminar,

workshop, atau pelatihan mengenai pemahaman fungsi dan tugas yang akan dijalankan terutama dalam pengawasan pemerintah daerah. Pemahaman yang kurang baik dikhawatirkan akan memudahkan pemerintah daerah melakukan penyelewengan dalam setiap pelaksanaan kebijakan.

5. *Tenure* tidak berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah, artinya anggota DPRD yang sudah memiliki masa kerja yang lama belum tentu dapat melakukan pengawasan terhadap pemerintah daerah. Anggota DPRD harus bisa meningkatkan keahliannya terutama di bidang teknologi yang semakin berkembang. Maka dari itu, anggota DPRD masih harus mengikuti pelatihan tertentu untuk menambah wawasan dan kemampuan dalam menjalannya tugas dan fungsinya. Selain itu, faktor eksternal juga cenderung mendominasi dalam melakukan fungsi pengawasan.
6. Temuan kelemahan pengendalian intern tidak berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah, artinya walaupun pemerintah daerah masih memiliki permasalahan kelemahan pengendalian intern tetapi Pengendalian intern yang tidak baik cepat diperbaiki akan menyebabkan penyelewengan semakin sedikit sehingga tidak akan berdampak pada kinerja pemerintah daerah.
7. Temuan ketidakpatuhan pada Undang-Undang berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah, artinya pemerintah daerah masih banyak melakukan penyelewengan ketidakpatuhan pada Undang-Undang. Temuan ini mengindikasikan bahwa pengelolaan keuangan daerah masih kurang baik. Temuan ketidakpatuhan pada UU yang banyak akan mengakibatkan proses pencapaian target kinerja terhambat dan juga mempengaruhi kinerja pemerintah daerah.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dijelaskan, maka peneliti memberikan beberapa saran untuk perbaikan penelitian selanjutnya. Adapun saran tersebut sebagai berikut :

1. Berdasarkan temuan hasil analisis data, skor kinerja pemerintah daerah saat ini masih kurang baik. Hal ini terlihat pada pemerintah daerah yang

mempunyai skor EKPPD dengan kategori kurang baik ada pada 103 pemerintah daerah atau 47% dari keseluruhan sampel pemerintah daerah. Maka dari itu pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan kinerjanya agar kebijakan yang diterapkan dapat sesuai dengan harapan masyarakat dengan cara mengevaluasi kebijakan yang diterapkan apakah sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau belum.

2. Berdasarkan temuan komposisi DPRD, pengetahuan, dan masa kerja yang masih rendah di beberapa pemerintah daerah maka bagi lembaga DPRD diharapkan dapat meningkatkan fungsi pengawasan terhadap pemerintah daerah dengan cara meningkatkan kualitas anggotanya dalam menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan aturan sehingga berdampak pada meningkatnya kinerja pemerintah daerah dengan cara meningkatkan efektivitas hubungan antar anggota DPRD maupun mengikutsertakan anggota dalam pelatihan demi memperdalam pemahaman fungsi dan tugasnya.
3. Diharapkan pada penelitian selanjutnya dapat mendapatkan data DPRD dari Pejabat Pengelola Informasi Daerah Komisi Pemilihan Umum sehingga data yang didapatkan semakin lengkap dan dapat menambah jumlah sampel yang lebih besar.